

Reformasi: Tantangan & Perubahan Baru untuk Indonesia

Waktu Presiden Suharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Suharto selama lebih dari tiga dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai Reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat (desentralisasi). Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam UU yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah-pemerintah daerah.

Peran Pemerintah Pusat dibatasi untuk menangani hanya hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan fiskal-moneter dan makroekonomi, peradilan dan agama. Yang tidak kalah penting adalah bahwa Daerah menerima bagian pendapatan yang lebih besar dari produksi sumber daya alam lokal. Sebelumnya, Daerah selalu merasa tidak nyaman melihat mayoritas pendapatan dari sumber daya alam lokal mengalir kepada para pemangku kepentingan di Ibukota Jakarta. Namun, karena tidak setiap daerah di Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, kesenjangan di antara daerah kaya dan miskin meningkat.

Seiring dengan kekuasaan, korupsi juga terdesentralisasikan ke tingkat daerah. Muncul "negara-negara bayangan" tempat elit daerah memegang kendali kekuasaan, bisnis dan aliran dana. Salah satu korban dari era baru ini adalah lingkungan hidup Indonesia. Izin-izin penebangan dan pertambangan dalam skala besar diberikan oleh otoritas lokal (terutama di pulau-pulau yang kaya sumber daya seperti Sumatera dan Kalimantan) sebagai ganti bayaran uang yang besar. Pemberian izin ini biasanya dilakukan tanpa proses administratif maupun pengawasan yang layak. Sekarang, hampir 20 tahun kemudian, konsekuensi dari tindakan-tindakan ini masih tetap terasa karena sering ada ketidakjelasan tentang ukuran wilayah konsesi karena pemerintahan yang lemah di era pasca-Suharto.

Proses desentralisasi juga disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan di daerah-daerah di Indonesia. Kekerasan ini terkait kuat dengan aspek etnis atau agama karena munculnya persaingan untuk posisi politik lokal dalam kaitannya dengan kebangkitan identitas daerah. Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, kunjungi bagian Kekerasan Etnis dan Agama.

Pemerintahan Bacharuddin Habibie (1998-1999)

Bacharuddin Jusuf Habibie, adalah wakil presiden selama masa jabatan presiden sebelumnya, Suharto. Dia menggantikan Suharto pada tahun 1998 ketika Suharto turun dari kursi kepresidenan. Namun, hal ini tidak mengakhiri sistem politik yang telah diterapkan selama Orde Baru. Banyak orang Indonesia sangat mencurigai Habibie karena kedekatannya dengan Suharto (yang telah menjadi sosok ayah bagi Habibie) dan fakta bahwa dia adalah pemain penting dalam sistem patronase politik Suharto. Penolakan Habibie untuk memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap harta kekayaan Suharto hanya memperkuat rasa ketidakpercayaan ini.

Habibie tidak memiliki pilihan lain selain meluncurkan program-program reformasi. Dia akan melakukan "bunuh diri politik" jika tidak mematuhi tuntutan masyarakat Indonesia itu. Selama masa kepresidenan Habibie, 30 undang-undang (UU) baru disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), beberapa di antaranya ditandai dengan perbedaan-perbedaan fundamental dengan perpolitikan di masa lampau.

Sejumlah tindakan reformasi penting adalah:

- Dimulainya kebebasan pers
- Pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru
- Pembebasan tahanan-tahanan politik
- Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun
- Desentralisasi kekuasaan ke daerah
- Keputusan penting lainnya adalah penjadwalan pemilihan umum baru, yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999. Kendati begitu, parlemen belum mempunyai niat untuk mengurangi pengaruh politik militer dan memerintahkan penyelidikan terhadap kekayaan Suharto.

Indonesia memasuki masa peningkatan kekerasan di daerah. Jawa Timur dilanda pembunuhan misterius (yang mungkin dilakukan oleh unit-unit tentara) sementara kekerasan agama berkobar di Jakarta, Ambon (Maluku), Kupang (Nusa Tenggara Timur) beserta Kalimantan Barat. Selain itu, ada tiga daerah yang memberontak terhadap Pemerintah Pusat: Aceh (Sumatera), Irian Jaya (Papua) dan Timor Timur.

Ini semua menghasilkan kondisi yang membuat para investor asing sangat ragu-ragu untuk berinvestasi, sehingga menghambat pemulihan ekonomi Indonesia. Tidak kalah penting adalah pembersihan sektor keuangan Indonesia, yang telah menjadi jantung dari Krisis Keuangan Asia di akhir tahun 1990-an. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), didirikan pada Januari 1998, menjadi sebuah lembaga yang kuat yang melakukan serangkaian kegiatan terpadu dan komprehensif mencakup masalah seperti program liabilitas bank, pemulihan dana negara, restrukturisasi perbankan, restrukturisasi pinjaman bank, dan penyelesaian sengketa kepemilikan saham.

Kasus Timor Timur adalah salah satu hal yang menyebabkan banyak konflik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Timor Timur telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1975 tetapi diinvasi oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Hal ini tidak mengakhiri keinginan Timor Timur untuk merdeka. Habibie memiliki sikap terbuka terhadap kemerdekaan Timor Timur. Dia menyatakan bahwa jika Timor Timur menolak status provinsi otonomi khusus di Indonesia, maka Timor Timur dapat merdeka.

Pernyataan Habibie ini tidak disetujui oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sangat ingin mencegah pemisahan Timor Timur dari Indonesia. Menurut pihak TNI, pemisahan Timor Timur itu berbahaya bagi persatuan Indonesia karena dapat menyebabkan efek domino di provinsi-provinsi lain. Diputuskan bahwa rakyat Timor Timur boleh membuat keputusan ini melalui referendum. Hasil referendum ini adalah bahwa 78% pemilih memilih untuk merdeka. Tentara Indonesia kemudian bereaksi dengan menyerang banyak wilayah di Timor Timur, menewaskan lebih dari seribu orang.

Reputasi Habibie rusak parah akibat hilangnya kendali atas situasi politik di Timor Timur. Meskipun unit tentara dan milisi sipil yang melakukan tindak kekerasan ekstrim, Habibie secara pribadi dianggap bertanggung jawab sebagai presiden yang menjabat. Selain itu, Habibie sendiri dikaitkan dengan skandal korupsi besar yang melibatkan Bank Bali. Bank ini menerima dana dari BPPN untuk rekapitalisasi tetapi - diduga - hampir setengah dari dana tersebut digunakan oleh tim kampanye Habibie.

Pemilihan Tahun 1999

Setelah tahun 1955, masyarakat Indonesia harus menunggu selama 44 tahun untuk menyaksikan contoh lain dari pemilihan parlemen yang bebas dan adil. Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 masyarakat memilih partai politik, bukan individu. Karena tidak ada batasan untuk pembentukan partai-partai politik (sebagai bagian dari program reformasi), Indonesia menyaksikan menjamurnya partai-partai baru. Tidak kurang dari 48 partai diizinkan untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 1999, meskipun sebagian besar partai-partai ini memainkan peran yang tidak signifikan.

Kebanyakan partai politik itu hanya bisa mengandalkan sedikit dukungan saja dari masyarakat. Dalam perpolitikan modern Indonesia, sebuah partai politik pada dasarnya adalah kendaraan politik untuk individu tertentu dan bukan lembaga yang mengekspresikan ideologi atau visi bersama. Karena hanya beberapa orang bisa mengandalkan dukungan publik selama Pemilu 1999, kebanyakan partai politik ditakdirkan untuk menerima sedikit suara.

Salah satu dari tokoh-tokoh tersebut adalah Megawati Soekarnoputri, putri Presiden pertama Indonesia Soekarno. Dia telah mendirikan sebuah partai baru PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pada tahun 1998 setelah dikeluarkan dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia) pada tahun 1996. Karena warisan ayahnya dan perlawanannya terhadap Orde Baru menjelang akhir pemerintahan Suharto, ia menikmati popularitas yang tinggi (terutama di Jawa dan Bali). Mirip dengan ayahnya, dia menekankan persatuan nasional dan mengkampanyekan nasionalisme sekuler.

Tokoh nasional populer lainnya yaitu Abdurrahman Wahid yang telah mendirikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pada tahun 1998. Sebelumnya, dia menjabat sebagai ketua organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), tapi kemudian mengarahkan tujuannya untuk menjadi presiden. Wahid mengkampanyekan sejenis nasionalisme toleran dan mengandalkan dukungan populer dari masyarakat Muslim tradisional (sebagian besar di Jawa).

Habibie, presiden Indonesia yang menjabat, memiliki ambisi untuk mempertahankan posisinya. Meskipun tidak begitu populer, dia bisa mengklaim bahwa dia yang telah meluncurkan program reformasi dan bisa mendapatkan keuntungan dari mesin politik Golkar (Golongan Karya) yang kuat dan yang membentang sampai ke tingkat desa.

Terakhir, Amien Rais, tokoh oposisi terhadap Orde Baru Suharto, bergabung dalam perlombaan dengan Partai Amanat Nasional-nya (PAN) dan seorang outsider yang patut diperhitungkan.

Satu hal yang penting selama Pemilu ini adalah bahwa kursi di parlemen akan dibagi dua. Pulau Jawa menerima setengah dari kursi sementara separuh lainnya dibagi ke pulau-pulau lain. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi posisi dominan Jawa dalam perpolitikan nasional. Namun, karena Jawa memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dari luar Jawa, pada dasarnya tersirat bahwa suara non-Jawa lebih kuat dibanding suara Jawa. Situasi ini akan menyebabkan konsekuensi yang luar biasa untuk pemilu ini.

Pemilu Legislatif Indonesia 1999:

1999	
PDIP	34%
GOLKAR	22%
PKB	13%
PPP	11%
PAN	7%

Sekitar 90 persen dari pemilih Indonesia datang untuk memberikan suara mereka pada tanggal 7 Juni 1999. Seperti dugaan sebelumnya, PDI-P menerima sebagian besar suara (34 persen) dengan Golkar pada posisi kedua (22 persen). Namun, kedua partai tersebut mendapat alokasi jumlah kursi yang hampir sama dalam parlemen karena PDI-P menerima sebagian besar suara dari pulau Jawa, sementara Golkar menikmati suara terbanyak dari luar Jawa.

Pada bulan Oktober, Habibie harus menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan MPR. Pidato ini adalah laporan tentang kinerjanya sebagai presiden dan kinerja kebijakan selama masa kepresidenannya. Pidatonya ditolak oleh mayoritas anggota MPR. Setelah penolakan ini, Habibie memutuskan untuk menghentikan ambisinya menjadi presiden pada tahun 1999. Ini berarti bahwa sekarang hanya ada dua orang yang menikmati dukungan politik yang signifikan untuk menjadi presiden berikutnya dari Indonesia yaitu Megawati dan Wahid. Di sesi lain, MPR Indonesia akhirnya memilih Wahid sebagai presiden baru. Megawati menjadi wakil presiden baru dan Rais terpilih sebagai ketua MPR.

Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Dalam rangka mendirikan koalisi yang luas, Wahid menunjuk anggota dari berbagai partai politik serta perwira TNI sebagai menteri untuk kabinetnya. Tapi komposisi yang beragam ini juga mengimplikasikan kurangnya kohesi dalam kabinet dan, terlebih lagi, hanya berisi beberapa tokoh reformis saja. Wahid melakukan upaya untuk mengurangi peran politik TNI namun hal ini menyebabkan konflik dan kemudian hilangnya dukungan dari TNI.

Tanpa dukungan dari TNI, hanya ada sedikit cara untuk bertahan sebagai presiden Indonesia yang saat itu dilanda konflik dan kekerasan di banyak daerah. Kerusuhan-kerusuhan di daerah ini membutuhkan intervensi TNI namun karena konflik dengan Wahid, TNI tampaknya tidak

tertarik menyelesaikan atau mengintervensinya yang mengakibatkan merosotnya kekuasaan Presiden Wahid.

Kasus-kasus korupsi tampaknya masih sangat sering terjadi. Pada tahun pertamanya sebagai presiden, Wahid memecat tujuh menteri yang semua - diduga - terlibat dalam kasus korupsi. Empat dari menteri-menteri tersebut berasal dari empat mitra koalisi yang paling penting: PDI-P, Golkar, PPP dan PAN. Ini membuat Wahid menjadi semakin terisolasi. Dan - lebih parah lagi - Wahid sendiri juga dikaitkan dengan dua skandal korupsi yang akhirnya menyebabkan pemakzulannya. Kedua skandal itu dikenal sebagai 'Buloggate' dan 'Bruneigate', masing-masing melibatkan ketidakjelasan penggunaan dana publik. MPR Indonesia melihat ini sebagai kesempatan besar untuk memakzulkan Wahid dan Megawati kemudian ditunjuk menjadi presiden, sementara Hamzah Haz (pemimpin PPP) menjadi wakil presiden yang baru.

Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru Suharto, almarhum Ir Soekarno (Presiden Indonesia yang pertama) menjadi simbol oposisi terhadap pemerintah. Soekarno adalah pahlawan nasional yang telah mengabdikan hidupnya untuk - dan berhasil - mencapai kemerdekaan. Sebagian besar pengunjung rasa anti-Suharto lahir selama rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan karena itu mereka mungkin hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai era pra-Suharto. Tetapi bagi mereka Soekarno mewakili kebebasan, kemerdekaan dari Suharto. Oleh karena itu menjadi logis bahwa puterinya, Megawati, bisa mengandalkan dukungan besar dari masyarakat.

Namun, dukungan ini hanya didasarkan pada statusnya sebagai putri Soekarno dan tidak didasarkan pada visi politiknya maupun keterampilannya. Kabinetnya tidak banyak berbeda dari kabinet awal Wahid: berisi basis partai-partai yang beragam dan perwira TNI juga terwakili dengan baik. Megawati sendiri tidak melakukan banyak pengambilan keputusan, dia menyerahkannya pada para menterinya. Tidak ada tanda-tanda bahwa masalah korupsi ditangani sementara status quo dalam pemerintahan berlanjut.

Namun, meskipun Megawati sendiri tidak tampak sangat mendukung reformasi politik, proses reformasi sebenarnya telah dirintis pada tahun 1999 ketika parlemen mulai merancang banyak UU baru (termasuk amandemen-amandemen konstitusi) yang akan berlaku efektif selama kepresidenan Megawati. Langkah-langkah reformasi ini menyiratkan peningkatan signifikan dalam checks and balances demokratis yang mengakhiri kemungkinan kembalinya rezim otoriter. Kebijakan-kebijakan reformasi ini menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, bukan Pemerintah Pusat. Selain itu, cabang-cabang eksekutif dan legislatif dipisahkan dengan lebih ketat.

Pendahulu Megawati (Wahid) melakukan upaya kuat untuk mengurangi pengaruh TNI (yang benar-benar melemahkan posisinya), tetapi Megawati tidak berniat untuk ikut campur dengan urusan TNI. Akibatnya, TNI kembali mendapatkan sejumlah pengaruh dalam politik. Apalagi, perkembangan internasional juga meningkatkan peran TNI. Setelah serangan 11 September 2001 terhadap Menara Kembar di New York, pemerintah Amerika Serikat melanjutkan kerjasama dengan militer Indonesia (yang sempat terhenti sejak partisipasi TNI dalam kekerasan di Timor Timur di tahun 1999) untuk memerangi terorisme internasional.

Meskipun MPR telah berhati-hati dalam mengurangi peran politik tentara, Panglima Besar TNI lah yang menyatakan pada tahun 2004 bahwa fraksi TNI harus dihapuskan dari MPR. Seorang perwira TNI yang ingin aktif dalam dunia politik harus mengundurkan diri terlebih dulu dari posisinya di TNI. Reformasi ini direalisasikan tetapi tidak berarti mengakhiri pengaruh politik TNI dalam masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, TNI adalah kekuatan yang besar karena para mantan jenderal yang ingin aktif dalam politik masih bisa mengandalkan jaringan di dalam TNI, apalagi, tentara masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan usaha di daerah.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Setelah Indonesia selama tiga tahun diperintah oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), putri dari almarhum Soekarno, waktunya tiba untuk pemilihan parlemen dan presiden baru di Indonesia, perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan kepulauan terbesar di dunia. Namun, baik Megawati maupun partai PDI-P kehilangan sebagian besar dukungan rakyat menjelang pemilu 2004 dan karena itu banyak yang yakin Megawati akan keluar dari istana presiden setelah pemilu. Memang mereka benar. Selama dekade berikutnya Indonesia akan di bawah kepemimpinan presiden baru yaitu mantan jenderal tentara Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemilihan Umum 2004

Pemilu Legislatif

Pada bulan April tahun 2004, sekitar 84 persen dari pemilih Indonesia (atau sekitar 113.5 juta orang) memberikan suara mereka untuk pemilihan legislatif nasional. Kontras dengan Pemilu tahun 1999, kali ini Indonesia bisa memilih kandidat tertentu dari partai yang membawa elemen yang lebih personal dalam pemilihan ini.

Dalam pemilihan ini, dua partai terbesar dari pemilu sebelumnya, yaitu PDI-P beserta Golkar, kehilangan mayoritas mutlak mereka. PDI-P jatuh - sesuai dengan dugaan - dari 34 persen menjadi 19 persen karena rakyat Indonesia tidak puas dengan kinerja Megawati sebagai presiden. Dia tampaknya kurang memiliki visi dan kepemimpinan, sementara korupsi dalam partainya tumbuh. Golkar, yang telah terbukti mampu bertahan tanpa dukungan dari Suharto dan TNI, mempertahankan bagian suaranya (22 persen), meski Golkar mengharapkan untuk mendapat lebih banyak suara.

Namun dua pendatang baru, keduanya tidak ikut dalam pemilu 1999, menarik perhatian. Yang pertama adakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang menempatkan penekanan besar pada peran Islam dalam kehidupan publik. Partai ini menerima tujuh persen suara dalam Pemilu 2004. Yang kedua adalah Partai Demokrat (PD). Partai ini adalah kendaraan politik Susilo Bambang Yudhoyono (sering disebut sebagai SBY), Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam kabinet Megawati. Yudhoyono berharap untuk menjadi wakil presiden pada tahun 2001 namun kalah dengan Hamzah Haz.

Memiliki aspirasi politik pribadi yang tinggi dan didukung sekelompok kecil intelektual di sekelilingnya (yang mendirikan PD terutama untuk dia), Yudhoyono tampaknya menjadi calon presiden yang kuat untuk Pemilu 2004. Hal ini mengusik Megawati dan menyebabkan keretakan di antara keduanya. Pada awal 2004, Yudhoyono meninggalkan kabinet Megawati, keputusan yang sebenarnya membuatnya bahkan lebih populer. PD menerima lebih dari tujuh persen suara, memungkinkan Yudhoyono untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden tahun 2004 (sebuah partai membutuhkan minimal lima persen untuk diizinkan menominasikan calon presiden).

Pemilu Legislatif Indonesia 2004

	2004	1999
PDIP	19%	34%
GOLKAR	22%	22%
PKB	11%	13%
PPP	8%	11%
PD	7%	-
PKS	7%	-

Pemilihan Umum Presiden

Pada bulan Juli 2004, masyarakat Indonesia pergi ke kotak suara untuk pemilihan presiden. Pemenang pemilu ini membutuhkan mayoritas mutlak, karena itu tampaknya kemungkinan besar bahwa putaran kedua akan diperlukan di mana dua kandidat dengan suara terbanyak dari putaran pertama bersaing satu sama lain.

Karena fakta bahwa presiden dan wakil presiden berpartisipasi dalam pemilu ini sebagai pasangan yang tak terpisahkan, komposisinya menjadi kepentingan strategis. Yudhoyono (PD), memimpin dalam survei dan pol opini, bekerja sama dengan Jusuf Kalla (pengusaha dari Indonesia Timur). Megawati (PDI-P) dipasangkan dengan Hasyim Muzadi (ketua Nahdlatul Ulama). Pasangan lain yang tampaknya memiliki kesempatan, meskipun kecil, adalah Wiranto (mantan jenderal Angkatan Darat, dicalonkan oleh Golkar) yang bergabung dengan Sallahudin Wahid (wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).

Dengan 33.5 persen suara, kurang dari yang diharapkan, Yudhoyono dan Kalla menjadi pemenang dari putaran pertama. Pada tempat kedua, dengan demikian berhak untuk bersaing di putaran kedua, adalah pasangan Megawati-Muzadi yang menerima 26.5 persen suara. Seperti yang diduga, putaran kedua itu dengan mudah dimenangkan oleh Yudhoyono dengan mayoritas mutlak 60.5 persen kemudian ia dilantik sebagai presiden baru Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004.

Pemilu Presiden Indonesia 2004:

	2004 (1 st round)	2004 (2 nd round)
Yudhoyono—Kalla	33.5%	60.5%
Megawati—Muzadi	26.5%	39.5%
Wiranto—Wahid	22.0%	-
Rais—Yudho Husodo	14.5%	-
Haz—Gumelar	3%	-

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono I (2004-2009)

Partai Demokrat (PD) terutama didirikan sebagai kendaraan politik Yudhoyono untuk menjadi presiden Indonesia. Partai ini mengkampanyekan demokrasi, pluralisme dan profesionalisasi tentara (Yudhoyono sendiri pensiunan jenderal TNI). Tetapi politik bukan sesuatu yang baru untuk Yudhoyono yang menjadi kepala staf untuk urusan sosial-politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1997. Di posisi ini Yudhoyono menunjukkan sikap reformis ketika ia mempresentasikan 'Paradigma Baru' yang menyerukan diakhirinya keterlibatan langsung TNI dalam bidang politik (melalui penarikan bertahap dari parlemen nasional dan regional) dan menyerukan pemisahan antara tentara dan polisi (pemisahan ini akhirnya diputuskan pada masa kepresidenan Habibie dan berlaku efektif selama pemerintahan Wahid).

Yudhoyono kemudian menjadi Menteri Pertambangan dan Energi selama masa Presiden Wahid dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selama masa Presiden Megawati. Dalam kedua kasus, keretakan hubungan dengan presiden menyebabkan ia diberhentikan dengan segera. Namun, dia tetap menikmati popularitas di kalangan masyarakat Indonesia karena ide-ide reformisnya, mediasi suksesnya di sejumlah konflik kekerasan daerah, dan catatan hidupnya yang bersih korupsi (korupsi sebenarnya merupakan elemen penting dalam kampanyenya sebelum pemilihan).

Sejak awal harapan untuk masa kepresidenannya yang sangat tinggi. Yudhoyono, yang dianggap sebagai karakter yang kuat dan seimbang, memasuki Istana Presiden dengan cita-cita reformis ambisius seperti menghancurkan korupsi dan terorisme, penguatan demokrasi dan hak asasi manusia, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Tentunya ambisinya - secara realistis - terlalu tinggi sebab Indonesia adalah negara yang sulit untuk direformasi dalam jangka waktu beberapa tahun. Birokrasi yang lambat dan tidak efisien, kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dalam masyarakat dan korupsi yang terus menyebar luas (terutama di daerah) membuatnya susah untuk menerapkan kebijakan secara efektif. Seperti yang dijanjikan selama periode kampanye, sekitar separoh dari menteri kabinet Yudhoyono terdiri dari profesional non-partisan (teknokrat), terutama pada posisi yang menyangkut ekonomi, dalam rangka mendorong profesionalisasi.

Masa kepresidenan Yudhoyono juga ditandai dengan bencana menyebabkan beberapa orang menyebut Yudhoyono sebagai 'Presiden bencana'. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di Aceh pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul (Daerah Istimewa Jogjakarta) pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang, semburan lumpur di Sidoarjo (yang merusak ratusan hektar di Jawa Timur dan menyebabkan evakuasi ribuan orang), sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar setengah juta orang pada tahun 2007 dan, terakhir, letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353 orang dan menyebabkan evakuasi 350.000 orang.

Prestasi baik dari pemerintahan Yudhoyono berhubungan dengan fundamental makroekonomi: utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahunan solid. Fundamental-fundamental ini kuat - didukung oleh boom komoditas pada tahun 2000-an dan

meningkatnya daya beli secara cepat - membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008-2009 tanpa masalah yang berarti.

Pemilihan Umum 2009

Pemilu Legislatif

Pemilu legislatif untuk DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) baru, yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009, jelas membuktikan kemenangan besar Partai Demokrat (PD) Yudhoyono (20.8 persen), sementara Golkar berada di posisi kedua (14.4 persen) dan PDI-P ketiga (14.0 persen). Faktor-faktor yang memberikan kontribusi untuk kemenangan PD ini adalah program uang tunai yang besar untuk masyarakat miskin dan penurunan harga pangan dan bahan bakar yang berkontribusi pada persepsi bahwa perekonomian nasional berkinerja baik. Masyarakat juga menganggap Yudhoyono bersungguh-sungguh dalam menghancurkan korupsi; PD dikenal sebagai partai politik dengan tingkat korupsi terendah.

Sebuah partai (atau sebuah koalisi partai-partai) yang memenangkan lebih dari 112 kursi (sama dengan dua puluh persen) dari 560 kursi DPR atau memenangkan setidaknya 25 persen dari suara nasional diizinkan untuk menominasikan calon presiden. Hal ini menempatkan Yudhoyono dalam posisi yang kuat untuk pemilihan presiden mendatang. Beberapa kontroversi muncul mengenai ambang batas parlemen yang baru ditetapkan yang menyatakan hanya partai-partai yang menerima lebih dari 2.5 persen dari suara rakyat bisa mendapatkan kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Ini membawa kerugian besar bagi partai-partai kecil.

Hasil yang menarik dalam pemilihan legislatif 2009 ini adalah meningkatnya preferensi untuk partai-partai sekuler-nasionalis dibandingkan partai-partai yang berwarna Islam. Gabungan total suara partai-partai Islam ini hanya mencapai 27.8 persen, menunjukkan tren penurunan yang terus-menerus dibandingkan dengan pemilu sebelumnya (38.1 persen pada tahun 2004).

Pemilu Legislatif Indonesia 2009

	2009	2004	1999
PD	20.8%	7.5%	-
GOLKAR	14.5%	21.6%	22.4%
PDIP	14.0%	18.5%	33.7%
PKS	7.9%	7.3%	1.4%
PAN	6.0%	6.4%	7.1%

Pemilu Presiden

Ada tiga pasangan yang bersaing untuk posisi presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun. Pertama-tama Presiden Yudhoyono yang sedang menjabat dengan PD yang telah memenangkan pemilu legislatif dan berhak untuk mencalonkan diri dalam satu periode lagi sebagai presiden Indonesia. Dia memilih Boediono sebagai mitranya untuk wakil presiden. Boediono, seorang ekonom, tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu dan

sebelumnya menjadi Gubernur Bank Indonesia (bank sentral) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada kabinet pertama Yudhoyono.

Pasangan kedua yang bersaing untuk posisi kepresidenan adalah Jusuf Kalla dari Partai Golkar (mantan wakil presiden Yudhoyono) yang memilih mantan jenderal angkatan darat Wiranto (yang pernah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur). Dan terakhir, Megawati Sukarnoputri kembali ikut bersaing. Kali ini ia memilih Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Prabowo, juga mantan jenderal Angkatan Darat, adalah mantan menantu Suharto. Apalagi dia diyakini bertanggung jawab atas kekerasan terhadap kaum intelektual dan mahasiswa yang anti-Suharto, kekerasan anti etnis Tionghoa di Jakarta (saat kerusuhan pada 1998) dan juga terkait pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur.

Tanpa membutuhkan putaran kedua kali ini, Yudhoyono dan Boediono memenangkan pemilihan presiden dengan mayoritas mutlak (60.8 persen). Dunia internasional menganggap kemenangan ini sebagai hal penting demi menjaga stabilitas politik di Indonesia. Pasangan Megawati-Prabowo menerima 26.8 persen suara, sementara Kalla-Wiranto berada di posisi ketiga dengan 12.1 persen.

Pemilu Presiden Indonesia 2009

2009	
Yudhoyono—Boediono	60.8%
Megawati—Prabowo	26.8%
Kalla—Wiranto	12.1%

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II (2009-2014)

Pada tanggal 22 Oktober 2009, berlangsung pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu II. Kabinet ini adalah koalisi antara PD, Golkar dan empat partai Islam PKS, PAN, PKB dan PPP. Selain menunjuk menteri dari enam mitra koalisi tersebut, Presiden Yudhoyono juga menempatkan beberapa profesional (tokoh-tokoh non-partisan atau teknokrat) pada posisi-posisi kementerian kunci seperti kementerian dalam negeri, luar negeri, keuangan, perdagangan, pendidikan nasional, dan kesehatan. Hanya dua mantan jenderal TNI saja yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet ini.

Kendati kinerja makroekonomi kuat, dukungan rakyat untuk Yudhoyono mulai terkikis. Yudhoyono tidak memenuhi harapan mengenai pemberantasan korupsi, yang pernah menjadi slogan kampanye penting dari partainya. kasus korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan menjadi berita utama secara rutin. Lebih parah lagi, PD sendiri jadi sangat terlibat dalam skandal korupsi ketika beberapa anggotanya, termasuk Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dituduh dan diadili untuk kasus korupsi Southeast Asian Games 2011. Diduga dalam even olahraga ini, uang suap telah dibayar sehubungan dengan pembangunan perkampungan atlet.

Kemudian, Ketua PD Anas Urbaningrum ditangkap dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena menerima suap terkait dengan pembangunan kompleks olahraga Hambalang di Jawa Barat. Skandal ini - semakin mendekat pada Yudhoyono - sangat merusakkan popularitas Yudhoyono maupun partainya.

Tiga menteri pemerintahan Yudhoyono juga ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Andi Mallarangeng (Menteri Olahraga dan Pemuda), Jero Wacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Suryadharma Ali (Menteri Agama). Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 300 pejabat pemerintah daerah diselidiki karena kasus korupsi selama periode kedua Yudhoyono, yang mengindikasikan luasnya korupsi di kalangan pemerintahan dan kegagalan Yudhoyono untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut opini publik pada umumnya munculnya kasus-kasus korupsi dalam PD adalah tanda lemahnya kepemimpinan Yudhoyono. Apalagi, Yudhoyono juga dianggap bertindak lemah berhubungan dengan hal lain. Banyak orang Indonesia yang pro-reformasi kecewa ketika Yudhoyono tidak mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang reformis dan sangat dihormati ketika dia - bersama dengan Wakil Presiden Boediono - dikritik karena kesalahan penanganan kasus bailout Bank Century pada tahun 2008. Sri Mulyani kemudian mundur dari jabatannya dan pindah ke Bank Dunia untuk mulai bekerja sebagai managing director. Kendati begitu, kebanyakan orang menganggap bahwa kepergiannya terhubung dengan tekanan dari kekuatan-kekuatan politik tertentu yang memiliki kepentingan-kepentingan bisnis besar karena kebijakan reformisnya telah menyebabkan konflik dengan kepentingan-kepentingan ini.

Kelemahan lain dalam kepemimpinan Yudhoyono berkaitan dengan kecamannya yang lambat dan tidak meyakinkan terhadap serangan kekerasan pada penganut agama-agama minoritas, seperti pembunuhan Ahmadiyah pada Februari 2011 ketika gerombolan orang yang mengatasnamakan Islam membunuh beberapa anggota sekte Ahmadiyah lokal yang kecil di Provinsi Banten.

Kendati diawali dengan menjanjikan, pemerintahan satu dekade Yudhoyono sekarang dianggap sebagai periode kesempatan-kesempatan yang hilang (missed opportunities). Yudhoyono menikmati dukungan besar di parlemen (di periode kedua) tetapi dia gagal untuk mendorong reformasi struktural yang sangat dibutuhkan (misalnya penghapusan subsidi bahan bakar minyak). Di satu sisi, Yudhoyono dikritik karena tidak tegas dan terlalu berusaha untuk berteman dengan semua pihak dan aliran masyarakat tetapi di sisi lain gaya kepemimpinannya berhasil meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia dan karenanya meletakkan dasar yang kuat bagi orang lain untuk membangun negaranya.

Pemerintahan Joko Widodo

Menjelang pemilu 2014 ada seorang baru yang ketuk pintu politik Indonesia. Joko Widodo (biasanya disebut Jokowi), mendapatkan popularitas luar biasa di kalangan orang Indonesia ketika ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta (2012-2014). Popularitas ini didasarkan pada latar belakangnya dia dan perilaku yang sederhana, keinginannya untuk mereformasi struktur dan pola yang ada, dan sikapnya yang pro-rakyat.

Pemilihan Umum 2014

Pemilu Legislatif

Karena kasus-kasus korupsi di PD dan fakta bahwa Susilo Bambang Yudhoyono telah mencapai batas maksimum dua kali masa jabatan presiden (walau dukungan baginya sudah turun drastis di tahun terakhir kepresidenannya), PD tidak memainkan peran besar dalam pemilu legislatif 2014. Bahkan, ada pendatang baru yang jadi pusat perhatian. Joko Widodo, mantan pengusaha (furniture dan properti), menjadi sosok yang sangat populer. Sebagai walikota Solo (Jawa Tengah) periode 2005-2012, ia tertarik untuk menjalin hubungan dekat dengan warga kota, sambil memperkenalkan serangkaian reformasi dan perubahan-perubahan positif lainnya.

Widodo, dikenal dengan nama Jokowi, kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, dibantu oleh calon wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (dikenal dengan nama Ahok), anggota etnis Tionghoa Kristen. Kedua pria ini mengalahkan gubernur yang menjabat, Fauzi Bowo, dan menjadi pemimpin Ibukota Indonesia pada tahun 2012. Jokowi melanjutkan pendekatan dan gaya yang ia tunjukkan di Solo, menjadi terkenal sebagai betul-betul "pria merakyat". Dia mereformasi pendidikan lokal, kesehatan dan transportasi umum, sambil meningkatkan transparansi untuk mencegah perilaku korupsi. Jokowi dan Ahok sering digambarkan seperti Batman dan Robin dari Jakarta karena tindakan mereka yang tegas dan cepat serta sikap pro-rakyat.

Menjadi gubernur Ibukota Indonesia otomatis membuat Jokowi mulai mendapatkan banyak perhatian dari media di Indonesia dan menjelang Pemilu 2014 ia termasuk - dan biasanya memimpin - dalam jajak pendapat publik untuk Pemilu Presiden 2014. Namun, sebagai tokoh non-partisan, ia membutuhkan partai politik untuk mendukungnya. Setelah sebuah periode penuh spekulasi, akhirnya diumumkan pada awal tahun 2014 bahwa PDI-P - masih di bawah kepemimpinan Megawati - akan mendukung Jokowi dalam Pemilu Presiden tahun 2014. Ketika berita ini mulai menyebar, para investor asing dan domestik langsung mengalirkan banyak dana ke pasar modal Indonesia.

Namun ada persaingan yang serius. Golkar, selalu kekuatan politik yang stabil dan solid, terus memiliki dukungan luas di seluruh negeri (terutama di luar pulau Jawa). Namun, Golkar punya satu kelemahan: pemimpinnya sekarang adalah pengusaha kontroversial Aburizal Bakrie. Bakrie Group adalah salah satu konglomerat terkaya di Indonesia, tapi sering dilanda skandal dan masalah utang. Salah satu perusahaan yang terkait dengan Bakrie disinyalir menyebabkan aliran lumpur raksasa di Sidoarjo (Jawa Timur). Kenaikan Bakrie sebagai ketua Golkar adalah salah satu dari banyak contoh bahwa politik uang tetap merupakan faktor penting dalam perpolitikan Indonesia. Meskipun Golkar bisa mengandalkan banyak dukungan rakyat, hanya sedikit yang percaya bahwa Bakrie memiliki kesempatan untuk menjadi presiden.

Ada juga mantan jenderal TNI Prabowo Subianto yang kontroversial yang telah mendirikan sebuah partai politik baru: Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Meskipun ia terkait dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, Prabowo menjadi tokoh populer karena ia memiliki karakter yang kuat (setelah sepuluh tahun pemerintahan tidak tegas Yudhoyono banyak orang Indonesia kembali menginginkan seorang pemimpin yang kuat). Selain itu, ia bisa

mengandalkan jaringan yang kuat di seluruh negeri (dan memiliki sumber daya keuangan untuk membiayai jaringan ini).

PDI-P memenangkan pemilu legislatif 2014 dengan mengumpulkan 18.95 persen dari suara. Namun, ini adalah kemenangan yang jauh lebih kecil dibanding prediksi kebanyakan orang dan analisis sebelumnya maka sejumlah orang mulai mempertanyakan apakah Jokowi memang pembuat mujizat seperti dugaan awal. Golkar berada di posisi kedua dengan 14.75 persen, diikuti oleh Gerindra (11.81 persen). Seperti dugaan, PD kehilangan sekitar setengah suara dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

Pemilu Legislatif Indonesia 2014

	2014	2009	2004	1999
PDIP	19.0%	14.0%	18.5%	33.7%
GOLKAR	14.8%	14.5%	21.6%	22.4%
GERINDRA	11.8%	4.5%	-	-
PD	10.2%	20.8%	7.5%	-
PAN	7.6%	6.0%	6.4%	7.1%

Pemilu Presiden

Ambang batas yang sama digunakan dalam Pemilu 2014 untuk pemilihan presiden, yang berarti bahwa partai - atau koalisi partai - yang mengontrol setidaknya 20 persen kursi di DPR atau menerima 25 persen suara nasional dalam pemilu legislatif dapat menominasikan calon presiden.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif 2014 ada empat partai politik yang berhasil memperoleh jumlah suara yang signifikan (>10 persen) dan dengan demikian memiliki kekuatan ketika melakukan tawar-menawar untuk kandidat presiden. Partai-partai ini adalah PDI-P, Golkar, Gerindra dan PD. Namun, PD berada dalam penurunan karena skandal-skandal korupsi sementara tidak muncul pemimpin baru dalam partai ini yang bisa memulihkan dan membawa partai ini ke era yang baru. Karena lebih merupakan kendaraan politik Yudhoyono untuk menjadikan dia presiden, partai itu pada dasarnya bukan apa-apa tanpa dia (Yudhoyono tidak bisa bersaing di Pemilu 2014 karena batasan dua periode jabatan presiden).

Sementara itu, Golkar secara internal terpecah mengenai kepemimpinan dan pencalonan ketuanya yang kontroversial Aburizal Bakrie. Dengan demikian, pada dasarnya ada dua calon (juga berdasarkan berbagai jajak pendapat): Joko Widodo (didukung oleh PDI-P) dan Prabowo Subianto (dengan Partai Gerindra-nya). Namun, mereka membutuhkan mitra koalisi serta pasangan (calon wakil presiden).

Jokowi bekerja sama dengan veteran politik Jusuf Kalla. Pasangan ini didukung oleh PDI-P, NasDem, PKB dan Hanura. Pasangan lain terdiri dari Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (mantan menteri ekonomi dan ketua PAN). Pasangan ini didukung oleh Gerindra, PAN, PPP, PKS dan Golkar. Fakta bahwa Kalla (yang memiliki sejarah panjang dalam partai Golkar) bekerja sama dengan Jokowi menunjukkan perpecahan tingkat tinggi dalam partai Golkar yang - secara resmi - mendukung Prabowo sebagai calon presiden dalam pemilu ini. Hal ini memperdalam perpecahan tersebut di partai Golkar.

Awalnya, Jokowi memimpin jajak pendapat dengan margin yang agak besar. Namun, dengan semakin dekatnya pemilu presiden (dijadwalkan pada tanggal 9 Juli 2014), keunggulan Jokowi memudar. Hal ini terutama disebabkan oleh jaringan yang baik dari Prabowo (sampai ke tingkat petani) dan liputan pers yang baik. Didukung oleh Grup Bakrie (yang memiliki stasiun televisi, website dan majalah) liputan pers yang positif dari Prabowo tersebar ke seluruh nusantara. Sementara itu, Jokowi didukung oleh stasiun berita (MetroTV) yang dimiliki Ketua NasDem Surya Paloh.